

APBD-P Barito Selatan 2019 Alami Penambahan Sebesar Rp 15 Miliar



Pendapatan daerah pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada 2019 ini mengalami penambahan sebesar Rp 15.508.942.347, 00 dari yang ditargetkan pada APBD murni 2019 lalu.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titiek Aryani Djoedir saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah pada saat rapat paripurna DPRD, di Buntok, Kamis.

Ia menjelaskan, pendapatan daerah pada APBD-P ini sebesar Rp 1.037.998.733.499, 92, dan mengalami peningkatan dibandingkan target pada APBD murni sebesar Rp 1.022.489.791.152, 92 atau naik sebesar 1, 52 persen.

“Pendapatan daerah yang mengalami penambahan sebesar Rp 15 miliar tersebut tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10.299.942.347,00 atau sebesar 11, 37 dari yang ditargetkan pada APBD murni 2019 lalu.

Setelah adanya penambahan tersebut kata dia, maka jumlah PAD yang ditargetkan pada APBD-P meningkat menjadi sebesar Rp 100.859.710.040.

Untuk dana perimbangan juga tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp 794.879.234, dan begitu juga dengan dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak, dan bukan pajak tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp 63.841.960.000.

“Begitu juga dengan dana perimbangan dari dana alokasi umum (DAU) tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp 590.286.244.000, dan dari dana alokasi khusus sebesar Rp 140.751.030.000,” jelas Satya Titiek Aryani Djoedir.

Sedangkan untuk lain-lain dari pendapatan daerah yang sah mengalami penambahan sebesar Rp 5.209.000.000 yang semula Rp 137.050.789.459 menjadi Rp 142.259.789.459 pada rancangan APBD-P 2019 ini.

Demikian halnya dengan pendapatan hibah antara APBD murni dengan rancangan APBD-P juga mengalami penambahan sebesar Rp 5.209.000.000 atau 3,80 persen yang semula Rp 18.714.000.000 menjadi Rp 23.923.000.000.

“Kenaikan tersebut karena adanya penambahan dana BOS dari pemerintah pusat kepada sekolah yang ada di Barito Selatan ini,” tambah dia.

Sementara bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah sama dengan APBD murni sebesar Rp 34.018.099.042, dan untuk dana penyesuaian dan otonomi daerah masih tetap Rp 82.580.260.000.

Ia berharap rancangan perubahan APBD 2019 ini dapat dikaji, dan pada gilirannya mendapat persetujuan bersama antara DPRD dengan Bu sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga pada waktunya dapat ditetapkan, dan diundangkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Sidang paripurna IX masa sidang III DPRD Barito Selatan tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat (SOPD) setempat.